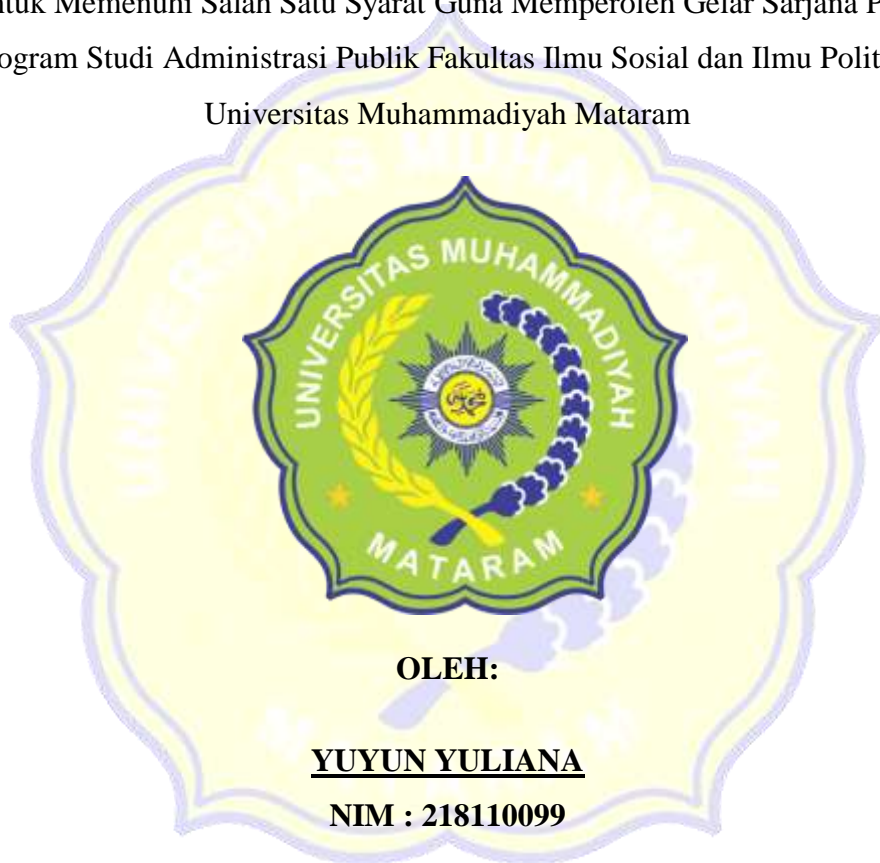


SKRIPSI

EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM BANTUAN HIBAH KUBE DI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

YUYUN YULIANA

NIM : 218110099

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM BANTUAN
HIBAH KUBE DI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB**

Oleh:

YUYUN YULIANA
NIM. 218110099

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui :
Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II,



Salmin, S.Pd., M.Si
NIDN. 0855037201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM BANTUAN
HIBAH KUBE DI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB**

Oleh:

YUYUN YULIANA
NIM. 218110099

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 04 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN: 0806066801

(PU) (.....)

Salmin, S.Pd., M.Si
NIDN: 0855037201

(PU) (.....)

Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S.
NIDN: 0031126484

(PU) (.....)

Mengetahui Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN: 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Yuyun Yuliana

Nim : 218110099

Alamat : Desa Piong, Rt 03 Rw 01 Dusun Krama Kec, Sanggar Kab, Bima
Nusa Tenggara Barat

1. Memang Benar skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin Dalam Bantuan Hibah KUBE Di Dinas Sosial Provinsi NTB.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termaksud meninggalkan gelar keserjanan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Januari 2022

sembuat pernyataan



Yuyun Yuliana
Yuyun Yuliana
Nim. 218110099



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN YULIANA
NIM : 210110099
Tempat/Tgl Lahir : PANG, 28 AGUSTUS 1999
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 0823-4066-7234
Email : yunliana024@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS KINERJA PEKAWAI SUB BAGIAN PEMANGGAPAN FAKIR
MISKIN DALAM BANTUAN HIBAH KUBE DI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02 MARET 2022

Penulis



YUYUN YULIANA

NIM. 210110099

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN YULIANA
NIM : 210110099
Tempat/Tgl Lahir : PIONG, 28 AGUSTUS 1999
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 0823-4066-7239 / yunliana029@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS KEMERJA PESAWAI SUB BAGIAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
DALAM BANKUAN HIBAH KUBE RI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02 MAREK 2022
Penulis



YUYUN YULIANA
NIM. 210110099

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

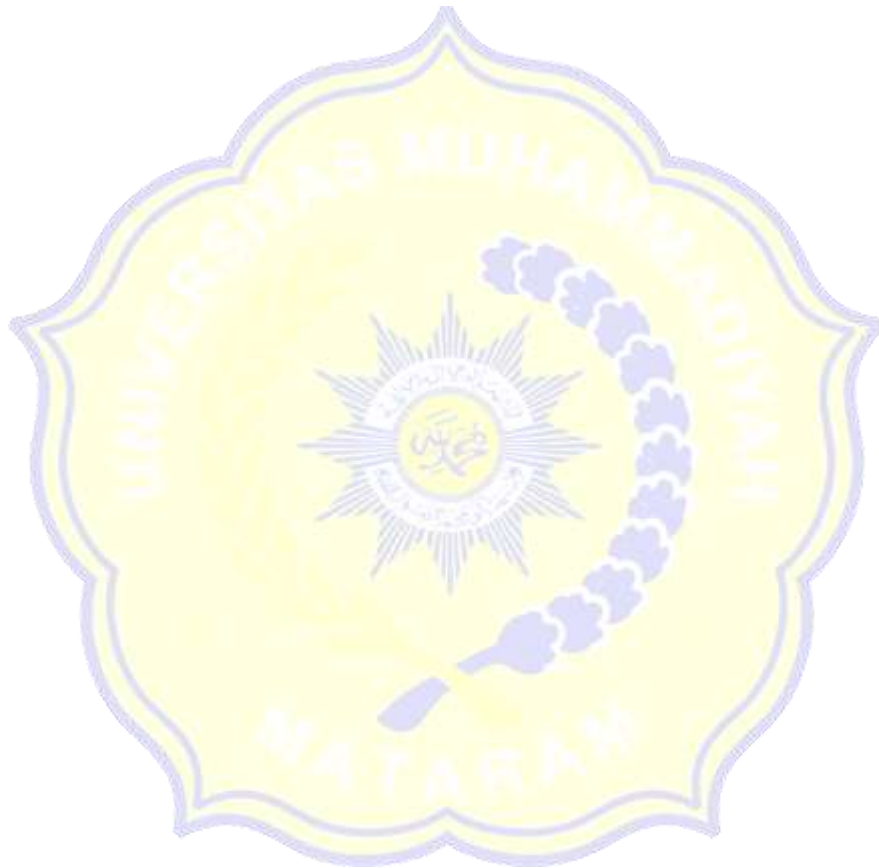


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.

Cemohan orang yang akan menjadi motivasi untuk menuju kesuksesan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk Orangtua Ama (Abakar) dan Ina (Nurisa) tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan kasih sayang penulis berterimakasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas. Dan untuk kakakku tersayang terimakasih yang selalu memberikan support, motivasi, dukungan, perhatian yang tak terhingga selama ini.

Untuk Keluarga UKM Teater Sasentra terimakasih telah menjadi wadah untuk penulis dalam merangkai arti dari persaudaraan yang indah teruntuk Pembina (kak Ijong) beliau sosok bapak ditanah rantauan yang sangat baik, beliau selalu memberikan arahan dan motivasi buat penulis serta Ketua Teater Sasentra (Agung) dan anggota Teater Sasentra yang sangat penulis cintai dan sayangi.

Persembahkan untuk sahabatku Faidah dan Sunarti terimakasih telah support serta dukungan untuk menjadi ke tahap sekarang. Serta Pejuang Squad AP Putri, Ummul, Meisah, Anis, Nurrahma, Riani, dan Mona yang selalu berjuang bersama.

Terimakasih juga untuk angkatan 2017 dan 2018 program studi administrasi publik untuk kebersamaan kita tidak akan terlupakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB”** skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu kali ini, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

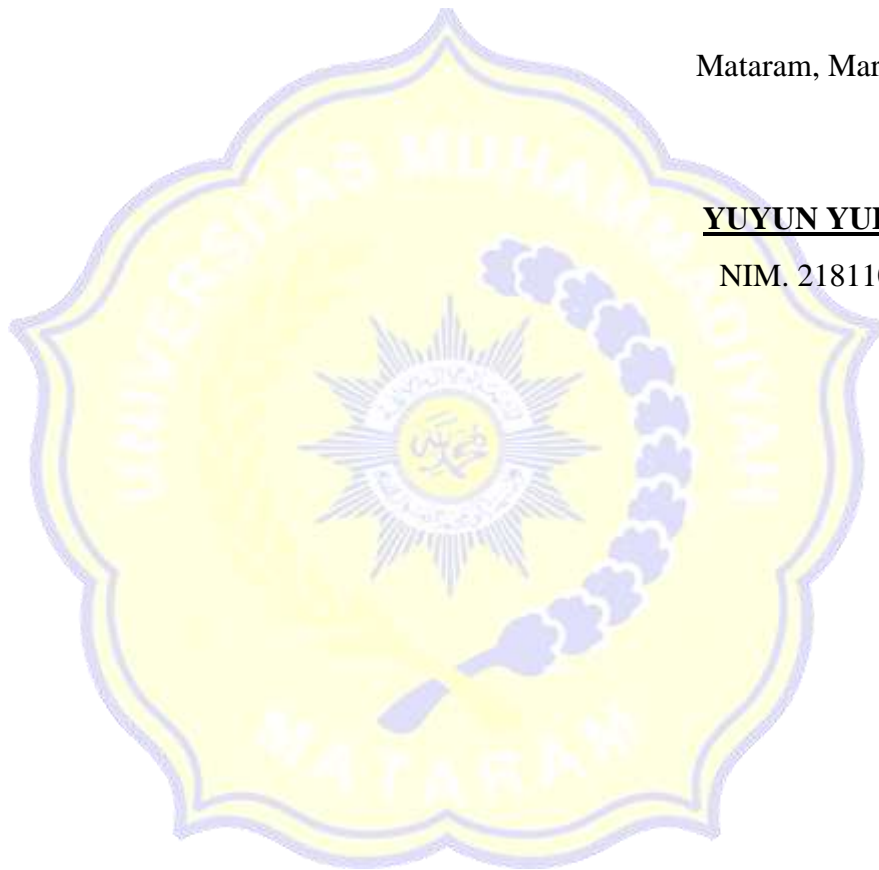
1. Bapak Dr. H Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali. M.Si, selaku Dekas fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Muhammad Ali. M.Si, selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Salmin, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa semangat serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun Skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari ini saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bias diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Maret 2022

YUYUN YULIANA

NIM. 218110099



**EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN PENANGANAN
FAKIR MISKIN DALAM BANTUAN HIBAH KUBE DI DINAS SOSIAL
PROVINSI NTB**

Muhammad Ali¹, Salmin², Yuyun Yuliana³

Pembimbing¹, Pembimbing², Mahasiwa³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Provinsi NTB sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, Dalam penanganan fakir miskin dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, bidang penanganan fakir miskin sebagai sub bagian di Dinas Sosial Provinsi NTB menangani hal tersebut, merencanakan program pemberdayaan fakir miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin (FM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah sejauh ini program hibah FM sudah efektif di Provinsi NTB, bersamaan dengan permasalahan (2) efektivitas kinerja sub bagian penanganan fakir miskin dinas sosial Provinsi NTB dalam menjalankan program Hibah Kube, (3) apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dialami pegawai sub bagian Penanganan Fakir Miskin dalam menangani bantuan hibah KUBE FM di Dinas Sosial Provinsi NTB.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dari berbagai narasumber, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara mengedit data, melakukan reduksi data, mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkat sumber nforman, penafsiran data, menguji keabsahan data dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian, pegawai di bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi NTB sudah bias dikatakan efektif dalam menangani bantuan hibah KUBE dilihat dari beberapa indikator yaitu: hasil kerja, perilaku, atribut dan komperatif atau pengetahuan dan wawasan terkait KUBE sudah sangat menguasai sehingga menjabarkan dan menjelaskan kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Serta faktor pendukung yaitu: data masyarakat KUBE yang lengkap keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam proses pertemuan, pembinaan, pendampingan.

Kata kunci : Efektivitas kinerja, Sub bagian PFM, Bantuan hibah KUBE Dinas Sosial Provinsi NTB

**PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF SUB AGAIN EMPLOYEES
HANDLING THE POOR IN CUBE GRANTS ASSISTANCE IN NTB
PROVINCE OF SOCIAL SERVICES**

Muhammad Ali¹, Salmin², Yuyun Yuliana³
First Consultant¹, Second Consultant², Student³

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Mataram Muammadiyah University**

ABSTRACT

The province of NTB is critical to poverty reduction. The field of handling the poor as a sub-section of the NTB Provincial Social Service holds this in the context of poverty alleviation, establishing programs for empowering the poor through a Joint Business Group (KUBE) approach through support Joint Business Group (KUBE) Grant for the Poor (FM).

This study aims to determine: (1) whether so far the FM grant program has been effective in the Province of NTB, along with the problems (2) the effectiveness of the performance of the sub-section for Handling the Poor at the Social Service of the Province of NTB in running the Kube grant program, (3) what are the become a supporting and inhibiting factor experienced by employees of the Poor Handling sub-division in handling KUBE FM grant assistance at the Social Service Office of the Province of NTB.

Descriptive qualitative research was used, with data collected through interviews, documentation, and observations from various sources. Researchers employed data analysis techniques by editing data, minimizing data, categorizing units relevant to informant sources, analyzing data, validating data validity, and drawing conclusions.

According to the study's findings, employees in the field of poor assistance at the Social Service Office of the Province of NTB are effective in handling KUBE grant assistance. It is based on several indicators, including work results, behavior, attributes, and comparative or knowledge and insights related to KUBE are very mastered to describe and explain well done to the community. The supporting aspects, such as complete KUBE community data, make employee verification easier.

Keywords: Performance effectiveness, PFM sub-division, KUBE grant assistance, Social Service Office of NTB Province

MENGENGSAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI AGLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Konsep Efektivitas	12
2.2.2 Ukuran Efektivitas	13
2.2.3 Konsep Efektivitas Kinerja.....	14
2.2.4 Konsep Efektivitas Kinerja Pegawai	16
2.2.5 Ruang Lingkup Sub bagian PFM	18
2.2.6 Ruang Lingkup tentang KUBE-FM	19
2.2.7 Teori Pelayanan Publik.....	28
2.3 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1 Jenis Data.....	36
3.3.2 Sumber Data	37
3.4 Instrumen Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	40
3.6 Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44

4.1.1 Profil Dinas Sosial Provinsi NTB.....	44
4.1.2 Visi Dinas Sosial Provinsi NTB	45
4.1.3 Misi Dinas Sosial Provinsi NTB	45
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB	46
4.1.5 Bidang-bidang Kerja Dinas Sosial Provinsi NTB	47
4.1.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi NTB.....	49
4.1.7 Profil Bidang PFM Provinsi NTB	49
4.1.8 Tugas dan Fungsi Bidang PFM Dinas Sosial Provinsi NTB.....	51
4.1.9 Tugas dan Fungsi Bidang PFM Perkotaan	52
4.1.10 Tugas dan Fungsi Bidang PFM Pedesaan	54
4.1.11 Tugas dan Fungsi PFM Pesisir dan Pulau Kecil Dinas Sosial ..	55
4.2 Efektifitas Kinerja Pegawai PFM dalam Menangani Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB.....	56
4.2.1 Hasil Kerja.....	57
4.2.2 Perilaku.....	58
4.2.3 Atribut dan Kompetensi.....	59
4.2.4 Komperatif.....	61
4.3 Efektifitas Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial	61
4.3.1 Sosialisasi Program KUBE.....	62
4.3.2 Kelompok Sasaran	65
4.3.3 Bantuan atau Anggran	66
4.3.4 Kesesuaian Bantuan dan Jenis Usaha.....	66
4.3.5 Penyaluran Bantuan Modal	67

4.2.6 Penyuluhan Keterampilan Berusaha.....	69
4.2.7 Proses pendampingan atau pembinaan	70
4.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74

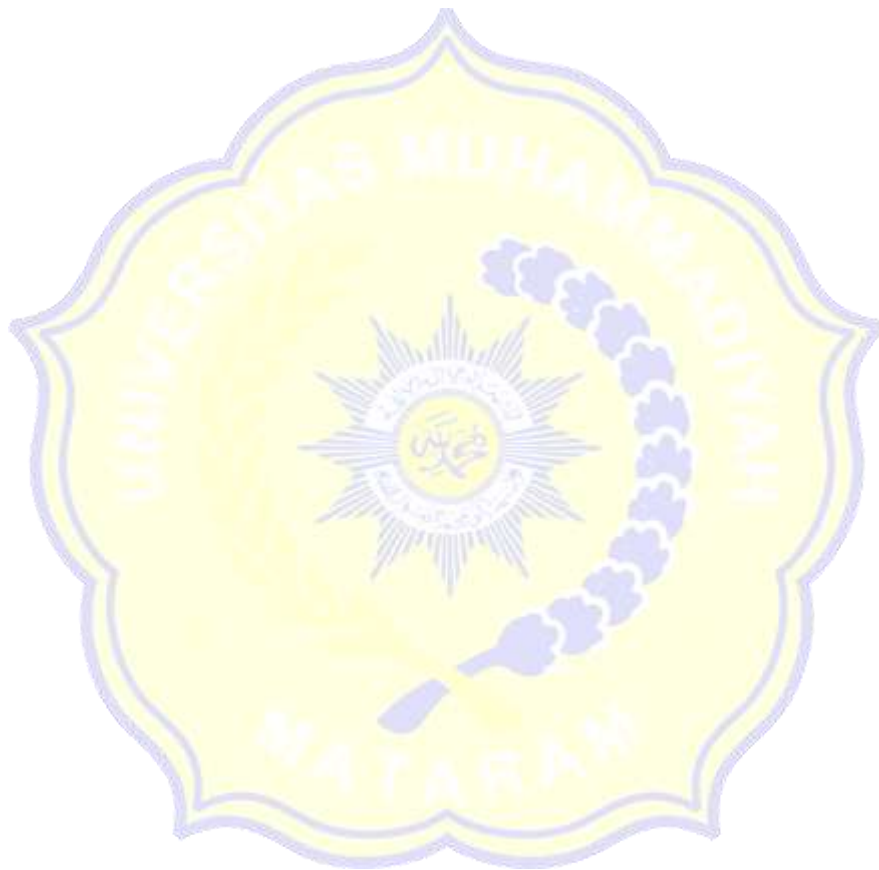
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



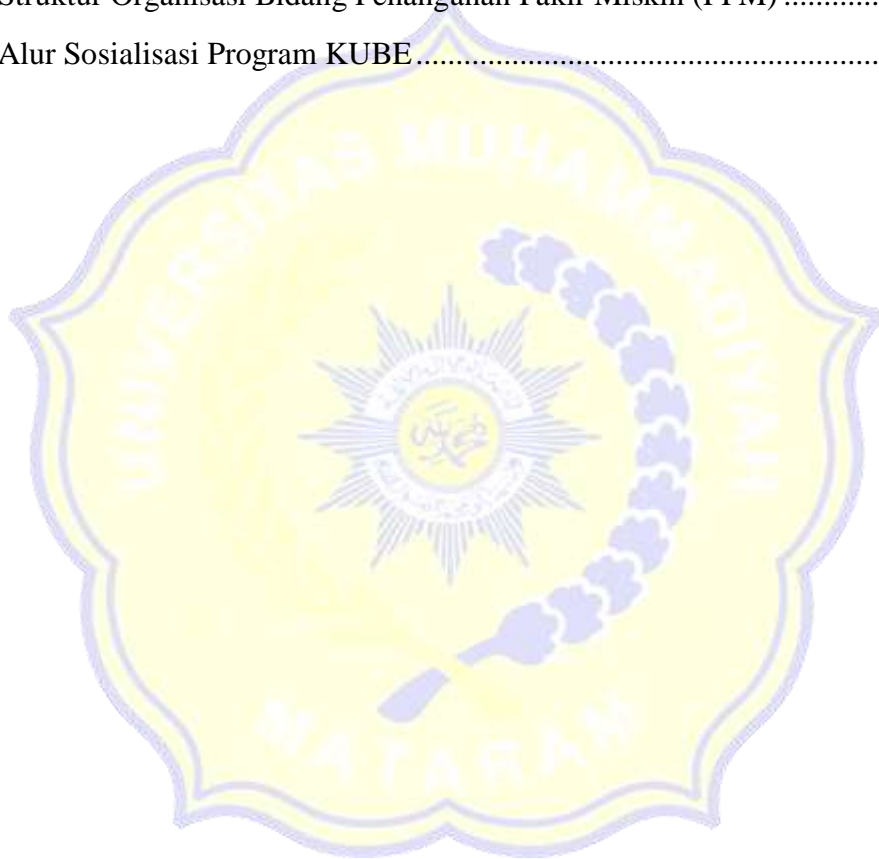
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.	Rincian Data Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin (PFM)....	50



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Kerangka Berpikir	33
2.	Langkah-Langkah Analisis	40
3.	Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB	41
4.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi NTB	49
5.	Struktur Organisasi Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM)	50
6.	Alur Sosialisasi Program KUBE	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dalam konsep, kesejahteraan sosial, dimaknai dengan masalah sosial yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan Sosial yang dimaksud menurut UU No 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahan secara integral. Seperti yang dikemukakan Supriyana (2010:122) bahwa Kemiskinan telah menjadi isu dunia di mana setiap negara memiliki kepentingan untuk berbicara tentang kebutuhan, baik itu negara yang sedang berkembang maupun yang sedang berkembang. Kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial adalah masalah prinsip perbaikan. Isu kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Terlebih lagi alasannya bukan karena tidak adanya makanan, betapapun miskinnya pada umumnya, lemah dalam menjalankan pekerjaan dan terbatasnya ketersediaan untuk latihan sosial, sosial dan keuangan sehingga mereka tertinggal jauh dari jaringan yang berbeda dengan potensi yang lebih tinggi.

Definisi kemiskinan sangat beragam, seperti Sholeh dalam (Khomsan, dkk, 2015;1) menyatakan bahwa kemelaratan adalah ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar pemanfaatan dan mengembangkan kondisi lebih lanjut, tidak adanya pintu terbuka potensi bisnis, ke pengaturan yang lebih luas yang menggabungkan sudut sosial dan moral.. Wibawa (2011:78) menambahkan, bahwa kemiskinan dapat dilihat dari aspek kondisi yang miskin artinya ditinjau dari kepemilikan sumber daya dan perolehan harta benda tidak memadai untuk hidup, Baik itu dari segi sumber daya alam seperti pemilikan lahan, sumber daya manusia walaupun seperti kesehatan atau gizi yang kurang dan walaupun berpenghasilan penghasilannya sangat rendah. Sehingga berada dalam situasi serba kekurangan. Berdasarkan Dengan ide ini, kebutuhan atau bantuan pemerintah mulai dirasakan sebagai keanehan yang berwajah banyak. Karena mengatasi masalah yang dihadapi tidak hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat, tetapi juga mencakup kecenderungan, nilai, dan masalah legislatif. Jika masalah kebutuhan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan masalah lain yang tentunya akan menambah masalah. Karena, dalam kasus yang berhubungan dengan masalah kebutuhan, itu juga akan mempengaruhi beberapa bidang yang berbeda di bidang keberadaan manusia, bahkan Hardiansyah (2011;20) menyebutnya sebagai *the vicious circle of poverty* atau lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang sangat mendasar dan krusial karena menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak penduduk di negara berkembang, seperti di Indonesia dan contohnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Tahun 2020-2021 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2020 tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen). Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020-maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Undang-undang RI No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial ditindaklanjuti Prepres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dalam rangka Pelonggaran kebutuhan. Pengurangan Kemiskinan merupakan strategi dan program pemerintah provinsi yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan bekerjasama dengan dunia usaha dan daerah setempat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin untuk bekerja pada tingkat bantuan sosial pemerintah.

Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat sebagai instansi pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berperan penting

dalam penanggulangan Kemiskinan. Dalam penanganan Fakir Miskin dalam rangka penanggulangan Kemiskinan, Bidang Penanganan PFM di Dinas Sosial Provinsi NTB yang menangani hal tersebut, merancang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penanganan Fakir Miskin, yang menjadi salah satu program unggulan Kemensos dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. KUBE sebagai pendekatan program penanggulangan kemiskinan dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran.

Tujuan yang ingin dicapai dari KUBE adalah mempercepat pemenuhan kebutuhan melalui upaya peningkatan kapasitas usaha insan KUBE secara bersama-sama dalam arisan, kenaikan gaji, pembinaan usaha dan peningkatan kepedulian dan ketangguhan sosial antara insan KUBE dengan lingkungan sekitar. Sebagai aturan umum, KUBE dibingkai bertekad untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan bantuan sosial pemerintah untuk mitigasi kemiskinan.

Kementerian Sosial RI memiliki pengaturan untuk mengkoordinir pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin melalui jalur yang

terintegrasi dengan KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Beberapa program gerakan KUBE yang disusun Kemensos difokuskan pada: pertama, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk masyarakat miskin. Kedua, peningkatan Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap daerah miskin atau terluar kota untuk dijadikan modal usaha bagi KUBE miskin.

Berbagai upaya di atas diharapkan dapat: Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin. Kedua, mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga fakir miskin. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan sosial. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Kelima, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah kemiskinan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

Upaya-upaya untuk mencapai keadaan tersebut dapat dilakukan dengan suatu metodologi yang melibatkan kaum miskin dalam perasaan memberdayakan kaum miskin baik yang berkaitan dengan orang-orang maupun perkumpulan, melalui penyusunan arahan sosial dan kemampuan khusus dari aspek keuangan produktif, dewan bisnis moneter yang bermanfaat. Para eksekutif, bisnis mempromosikan dewan dan kemajuan organisasi bisnis perintis, perbaikan diri, kesadaran diri dalam usaha,

pekerjaan keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan kemampuan IKS, penilaian kebutuhan, masalah keluarga dan alam.

Sejak KUBE direncanakan sebagai pendekatan dalam penanganan kemiskinan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI selama kurang lebih sebelas tahun maka perlu dikaji, apakah sejauh ini program Hibah KUBE sudah efektif terlebih lagi di Provinsi NTB, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi NTB yang adalah kantor yang mengelola dan sekaligus bertanggung jawab atas program tersebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi NTB. Yang dimana persoalan ini menjadi salah satu permasalahan penelitian sekarang, bersamaan dengan permasalahan efektivitas kinerja Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi NTB dalam menjalankan program Hibah KUBE dan apa saja yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami petugas atau pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin di dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB.

Sejalan dengan permasalahan yang akan di-ungkap di atas maka tujuan penelitian ini adalah sejauh mana Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB dan apakah Program Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB sudah efektif dalam pelaksanaannya. Juga apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat para pegawai Sub Bagian PFM Dinas Sosial NTB dalam menanggapi Bantuan Hibah KUBE. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: sebagai salah satu referensi dan bahan

pertimbangan kepada Dinas Sosial Provinsi NTB, khususnya Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin yang merancang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian maka saya tertarik mengangkat **“Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dilihat dari latar belakang maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB?
2. Apakah Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB sudah Efektiv dalam Pelaksanaanya?
3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami petugas atau pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam menangani Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adanya hal-hal tersebut di atas, maka peneliti ini bertujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB dalam Pelaksanaanya.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami petugas atau pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin di dalam Bantuan Hibah KUBE di Dinas Sosial Provinsi NTB.

1.3.2 Manfaat Penelitian

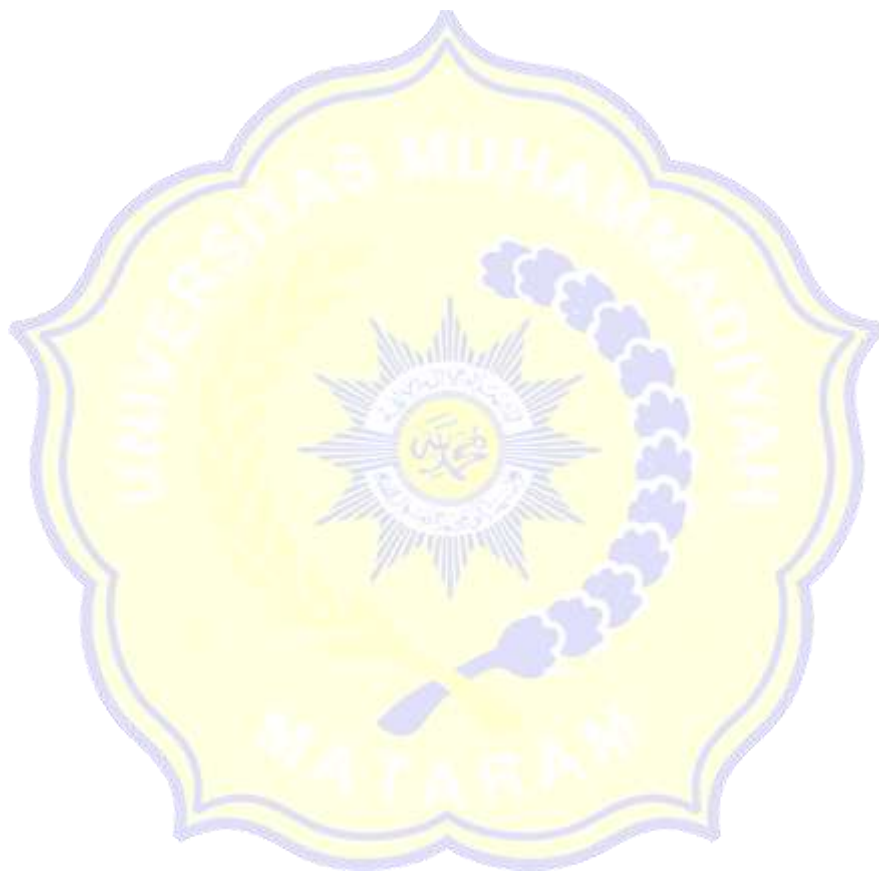
Setiap penelitian yang diarahkan harus memiliki manfaat dengan tujuan agar produk akhir dapat dinikmati. Dengan memimpin penelitian ini, dipercaya dapat memberikan manfaat bagi berbagai perkumpulan, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu dibidang administrasi publik dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada khususnya dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dan untuk jadi bahan perbandingan bagi penulis dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang diambil sebagai pedoman terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai KUBE-FM.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Hidayat, Engkus, Lita Setiawati, 2018.	<i>Peningkatan Kelompok usaha Bersama (KUBE) Melalui Evaluasi Program Dikecamatan Cimahi Tengah.</i>	Dari hasil penelitian tersebut, disadari bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Cimahi Tengah sudah efektif. Program KUBE terbukti memiliki opsi untuk lebih mengembangkan angka kemiskinan dan memungkinkan daerah di sub-wilayah Cimahi Tengah sekitar setengahnya. Unsur pendukung dalam pelaksanaan program KUBE ini adalah dengan memberikan energizer sebesar Rp. 20.000.000 oleh otoritas publik untuk setiap ikat KUBE tanpa dikembalikan sama besarnya dengan uang yang dapat digunakan untuk organisasi yang dibuat oleh setiap ikat KUBE.
2.	Ria Rizqy Wardianti, 2019	<i>Peran Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)</i>	Berdasarkan uraian peneliti, hasil penelitian yaitu tugas kelompok usaha bersama dalam menggarap bantuan pemerintah daerah adalah memimpin latihan penguatan keuangan. Acara gathering ini mencakup gathering standar, persiapan skill serta modal. Maka dengan program keuangan yang diselesaikan oleh kelompok usaha bersama barokah ini, diasumsikan menjadi bagian dalam memberdayakan perekonomian daerah di kota bhakti dimana penguatan sistem dalam Islam merupakan kebutuhan yang tidak diragukan lagi bagi setiap Muslim. Kehadiran berbagai macam miniatur dan perusahaan independen yang dikerjakan oleh sekelompok individu telah

			membantu mereka dalam menangani potensi keuangan mereka.
3.	Lalu Muhammad Farozi, 2020.	<i>Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur</i>	Hasil penelitian tingkat efektivitas program KUBE-FM di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur adalah masih kurang efektif. Pada proses sosialisasi masih tergolong minim dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Lotim, hal ini disebabkan pihak Dinas Sosial Lotim mengalami kekurangan anggaran, selain itu kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi. Pada proses penjangkaran kelompok KUBE, Dinas Sosial Lotim dinilai sudah memenuhi syarat karena sebelumnya, dilakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan KUBE, sehingga menerima bantuan. Pada indikator dana atau bantuan Dinas Sosial mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 perkelompok dan dana tersebut harus habis dibelanjakan untuk keperluan usaha kelompok. Kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan, dinilai belum sesuai dengan jenis usaha kelompok KUBE karena bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jenis dan kapasitas usaha yang besar. Proses penyuluhan keterampilan berusaha pada pelaksanaannya Dinas Sosial Lotim mendatangkan orang-orang yang berkompeten untuk mengisi penyuluhan tersebut. Pada proses pendampingan tidak berjalan maksimal karena faktor sumber daya pendamping yang tidak sesuai dengan kebutuhan KUBE, tidak maksimalnya proses pendamping dipengaruhi juga oleh faktor jarak antara lokasi KUBE dengan domisili pendamping yang relatif jauh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai dampak, pengaruh atau akibat. Dalam KBBI (2017), efektif mengandung arti dapat mendatangkan hasil, bersifat memaksa, bermanfaat atau berguna, mempunyai dampak.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dikerjakan secara efektif. Referensi kata logis terkenal (2012) mendefinisikan efektivitas sebagai jaminan pemanfaatan, penggunaan atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas adalah komponen prinsip untuk mencapai tujuan atau fokus pada itu telah ditemukan di setiap asosiasi, gerakan atau program. Disebut efektif bahwa tujuan atau sasaran yang diungkapkan tercapai. Menurut Mahmudi, (2005:92) “Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan, semakin menonjol (komitmen) hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif”.

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Upaya asosiasi yang berbeda dapat dibawa keluar melalui gagasan kecukupan. Ide ini adalah salah satu variabel untuk memutuskan apakah perubahan kritis harus dilakukan atau tidak. Untuk situasi ini, kecukupan adalah pencapaian tujuan otoritatif melalui pemanfaatan aset yang dapat diakses, sejauh sumber informasi, siklus, dan hasil.

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas juga dapat diperkirakan dengan melihat rencana-rencana yang belum sepenuhnya sesuai dengan hasil nyata yang telah dipahami. Bagaimanapun, dengan asumsi pekerjaan atau efek samping dari pekerjaan dan kegiatan yang diambil tidak sesuai, sehingga arah tidak tercapai atau tujuan normal, maka pada saat itu, dianggap tidak efektif. Standar atau ukuran pencapaian tujuan itu memaksa atau tidak sebagaimana diungkapkan oleh Tangkilisan (2005: 141), secara spesifik:

1. Produktivitas
2. Kemampuan Adaptasi Kerja
3. Kepuasan Kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian Sumber daya

2.2.3 Konsep Efektivitas Kinerja

Hasibuan (2007) Efektivitas khususnya kemampuan untuk menguasai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk memberikan sesuatu yang diharapkan selama pelaksanaan, khususnya penebusan dosa administrasi, tubuh dan jiwa yang berusaha menciptakan tenaga kerja dan produk untuk memperoleh imbalan kerja. Jadi Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih yang tepat.

Wibisono (2011) dalam mengukur Efektivitas kinerja suatu organisasi perlu adanya ukuran atau indikator pengukurannya. Indikator untuk mengukur efektivitas kerja meliputi: Absensi, ketersediaan pelatihan, motivasi komitmen karyawan, loyalitas karyawan. Menurut Manullang dalam (Muhammad Anwar, 2014;54) Hasil kerja adalah elemen yang mendorong perwakilan untuk melakukan gerakan tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Perjalanan munculnya inspirasi di mana individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka yang diabaikan, membuat individu mencari cara untuk mengurangi hal-hal yang disebabkan oleh kekurangan mereka. Ada 4 bagian evaluasi menurut Moehariono (2012), yaitu:

1. Hasil kerja yaitu kesuksesan pegawai dalam melakukan kerja (*output*) seperti terukur seberapa besar jumlah yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya dan besar kenaikannya. Hasil kerja diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2. Perilaku ialah aspek tindakan tunduh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti suatu sikap yang ditunjukkan seorang pegawai dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Perilaku menunjukkan tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada ditempat pegawai bekerja. Perilaku yang baik ditunjukkan oleh seseorang pegawai dapat dinilai dari segi kedisiplinan, kesopanan, dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja.
3. Atribut dan Kompetensi yaitu suatu kemahiran dan penguasaan pegawai sesuai tuntutan jabatan, hal ini berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan dan sikap yang dijadikan pedoman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai tuntutan jabatan. Dapat dinilai dari pengetahuan, keterampilan, dan keahlian.
4. Komperatif yaitu suatu perbandingan antara pegawai yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

2.2.4 Konsep Efektivitas Kinerja Pegawai

Efektivitas kinerja akan dicapai melalui rencana peraturan yang luar biasa dan setiap gerakan dengan proyek dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan semua proyek dan tujuan dapat dicapai, sehingga setiap tindakan yang terkait dengan pelaksanaan latihan harus memiliki pembagian usaha yang jelas dan dapat diwakili dalam efek samping dari pelaksanaannya.

Efektivitas kinerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Hal ini cenderung beralasan bahwa suatu tugas dapat dilakukan dengan tepat, sebenarnya, produktif dengan asumsi pekerjaan dilakukan dengan tepat sesuai dengan apa yang telah diatur, dan kecukupan pelaksanaan yang representatif dapat dianggap sebagai keadaan atau penyelesaian tugas yang telah dilakukan. diselesaikan oleh orang-orang untuk memberikan hasil normal itu membutuhkan perangkat keras. cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Menyelesaikan suatu tugas memiliki arti penting dalam sebuah asosiasi dalam suatu gerakan untuk memiliki pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, semua perwakilan, dua kepala atau pekerja dalam sebuah asosiasi harus memiliki pilihan untuk melakukan kewajiban kapasitas yang telah diturunkan ke mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Anwar (2014; 54) ada faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi, lebih spesifiknya:

1. Faktor individu (*personal Factors*)

Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen dan lainnya.

2. Faktor kepemimpinan (*leadership factors*)

Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan manajer.

3. Faktor kelompok (*team factors*)

Faktor kelompok atau rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang berkaitan oleh oleh rekan kerja.

4. Faktor sistem (*system factors*)

Faktor sistem berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Fasilitas yang disediakan yaitu dengan memberikan motivasi.

Kinerja pegawai tidaklah datang dengan sendirinya. Kinerja haruslah dikelola oleh pimpinan. Seperti apakah kinerja pegawai yang efektif dapat didiskusikan dan ditetapkan secara bersama antara pegawai dengan pimpinannya. Tanpa penetapan beban tugas dan arahan yang jelas, pegawai akan mengalami kebingungan dalam melaksanakan pekerjaanya. Situasi dan kondisi seperti ini sudah tentu akan mengurangi kinerja.

2.2.5 Ruang Lingkup Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin (PFM)

Didalam struktur kelembagaan Dinas Sosial Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid dan terdiri dari beberapa seksi diantaranya:

1. Seksi PFM Perkotaan
2. Seksi PFM Pedesaan
3. Seksi PFM Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Sub Bagian PFM bertugas menyusun bahan kebijakan teknis rencana program dan kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin. Adapun Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis, program pelaksanaan kegiatan bidang penanganan fakir miskin.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.
3. Penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyusunan bahan rumusan, evaluasi, kegiatan pelaksanaan teknis penanganan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Penyusunan bahan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan identifikasi sasaran dan penanganan fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Penyelenggaraan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan di bidang penanganan fakir miskin.

2.2.6 Ruang Lingkup Tentang KUBE-FM

a. Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)

Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan bersama. Kelompok bisnis bersama sehingga diartikan pertemuan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan untuk memikirkan bagaimana melanjutkan pekerjaan melalui hal-hal tertentu (Indrika 2013:18). Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor per-19/pb/2005 tentang Peredaran Modal Usaha Bantuan Aset Keluarga binaan sosial untuk penguatan fakir miskin melalui contoh perbaikan terkoordinasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) , menyatakan:

“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kumpulan keluarga yang bertempat tinggal dengan orang-orang miskin yang dibentuk oleh

daerah setempat, berkembang dan berkreasi berdasarkan dorongan mereka sendiri, sehingga mereka bergaul satu sama lain dan tinggal di wilayah tertentu dengan niat penuh bekerja dalam hubungan sosial yang bersahabat, dalam menangani kebutuhan individunya, mengurus masalah keuangan yang mereka alami dan berubah menjadi pertemuan untuk kemajuan bisnis bersama."

Kelompok Usaha Bersama adalah perkumpulan warga atau keluarga binaan yang didorong melalui kursus latihan sosial dan usaha keuangan dalam jiwa persekutuan sebagai cara untuk bekerja pada pedoman ramah (Indrika 2013:18).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai Kementerian RI (2016:115) "merupakan mekanisme penguatan keuangan keluarga kurang mampu untuk menggarap bantuan sosial pemerintahnya. Melalui kumpul-kumpul dapat saling terhubung, saling membantu dalam menangani masalah dan mengatasi kebutuhan. Sementara itu, sesuai dengan kantor Pendidikan dan belajar Keamanan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta (2013:307) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), lebih tepatnya "rancangan otoritas publik dalam penurunan kemiskinan diselesaikan oleh Kementerian Sosial, khususnya Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, yang diharapkan dapat menggalang arisan masyarakat kurang mampu dengan memberikan pengusaha melalui program Bantuan

Pemberdayaan Sosial Langsung (BLPS) untuk mengawal Usaha Ekonomi Produktif (UEP).”

Menurut Kementerian Sosial RI (2016:115-116) adalah sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki tujuan berikut:

1. Meningkatkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat miskin dandaerah dalam mengatasi berbagai masalah bantuan sosial pemerintah.
2. Mengerjakan bantuan pemerintah bagi keluarga kurang mampu.
3. Mengakui kemandirian bisnis sosial-moneter keluarga miskin.
4. Bekerja pada ketersediaan keluarga tidak mampu untuk administrasi sosial penting, kantor bantuan publik dan kerangka kerja perlindungan bantuan pemerintah sosial.
5. Meningkatkan kesadaran dan kewajiban sosial masyarakat dan dunia usaha dalam keringanan kebutuhan.
6. Meningkatkan kesadaran sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Dikutip dalam Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan dan Pengukuran Kinerja Arja Sadjiarto, bahwa kewenangan publik mungkin akan melayani kebutuhan daerah dengan sebaik-baiknya, yang dilakukan dengan mendirikan kantor atau kantor yang melaksanakan program. Organisasi terkait yang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan program KUBE-FM adalah Dinas Sosial setiap daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Bagi Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Miskin, maka aturan untuk kelompok sasaran program adalah atas keluarga atau kerabat yang menangani keluarga kurang mampu, berkepribadian kerakyatan, memiliki harapan bisnis, memiliki usia yang berguna, dan memiliki kemampuan, dapat memiliki rasa memiliki terhadap diri sendiri, dan akan mengikuti prinsip KUBE-FM (Kelompok Usaha Bersama untuk Masyarakat Miskin). Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang dagangan, atau administrasi kepada individu, keluarga, perkumpulan atau daerah yang miskin, tertindas, serta tidak berdaya terhadap bahaya sosial.
2. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUBE, adalah perkumpulan keluarga kurang mampu yang dibina, dikembangkan, dan dibina atas dorongannya dalam menyelesaikan usaha keuangan yang bermanfaat untuk membangun nafkah keluarga.
3. Fakir Miskin adalah orang-orang yang jelas-jelas tidak memiliki mata air pekerjaan dan memiliki mata air pekerjaan tetapi tidak dapat mengatasi masalah-masalah mendasar secara tepat bagi keberadaan dirinya dan orang-orang yang dicintainya.

4. Peduli kurang mampu adalah cara terkoordinasi, terstruktur, dan terpelihara yang digarap oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau daerah sebagai strategi, program, latihan penguatan, pembinaan, dan bantuan untuk memenuhi kepuasaan kebutuhan dasar setiap penduduk.
5. Pendamping Sosial KUBE adalah orang perseorangan yang diberikan tugas untuk membantu penerapan KUBE untuk menggarap bantuan sosial pemerintah perseorangannya.
6. Bantuan Sosial Ekonomi Produktif, adalah bantuan yang dibagikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah lingkungan untuk bekerja pada kemampuan untuk mendapatkan aset moneter, peningkatan batas usaha keuangan, peningkatan efisiensi kerja, peningkatan gaji, dan pendapatan umum. asosiasi bisnis yang menguntungkan.

b. Kelembagaan KUBE-FM

Kelembagaan KUBE telah di jelaskan oleh kementerian sosial melalui buku pedoman KUBE (2011:17), terkait pembentukan KUBE didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kedekatan tempat tinggal
2. Jenis usaha dan keterampilan anggota
3. Ketersediaan sumber daya dan ekonomi
4. Kemampuan menyesuaikan diri dalam kelompok
5. Kesamaan motivasi

6. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang sebelumnya.

Lebih lanjut mengenai pembentukan dan manajemen KUBE-FM, kelembagaan KUBE-FM ditandai dengan:

1. Kepengurusan KUBE-FM

- a. Pada dasarnya, KUBE-FM dibentuk dari, oleh dan untuk sekelompok individu. Kuantitas individu KUBE-FM diawali dengan pengembangan perkumpulan yang berjumlah dari 5-10 individu. Satu pertemuan KUBE-FM dapat memilih individu-individu yang tidak tergolong miskin (*poorest*), namun masih berstatus (*poor*) atau mendekati miskin (*near poor*) serta memiliki kapasitas dan potensi;
- b. Kepengurusan KUBE-FM terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus KUBE-FM dipilih dari sekumpulan individu yang bersedia dan siap membantu kemajuan KUBE-FM memiliki ciri-ciri misalnya semangat melayani, rasa terpanggil, siap menghimpun dan mengkoordinasikan latihan individunya. , memiliki ketekunan, informasi dan pengalaman yang memadai dan yang penting adalah efek samping dari pemilihan individunya.

2. Keanggotaan KUBE-FM

- a. Sebuah. Insan KUBE-FM adalah individu dengan masalah bantuan sosial pemerintah (PKMS) sebagai tujuan dari program

yang telah disusun. Jumlah individu untuk setiap KUBE-FM berkisar antara 5 hingga 10 individu/KK sesuai jenis PMKS.

- b. Secara eksplisit untuk Bina Lingkungan dan Rehabilitasi Sosial Permukiman, landasan KUBE-FM dilihat dari satuan-satuan permukiman sosial, menyiratkan bahwa satu kesatuan permukiman sosial adalah satu KUBE-FM.
- c. Menyatukan sekuritas, khususnya kedekatan dengan rumah, jenis usaha atau kemampuan individu, aksesibilitas aset, landasan kehidupan sosial, memiliki kesamaan inspirasi, kehadiran perkumpulan lokal yang telah berkembang dan dibuat sejak lama pemilihan individunya.

c. Kategori Perkembangan KUBE-FM

Kategori peningkatan KUBE bergantung pada penilaian berbagai penanda yang meliputi bidang kelembagaan, sosial, dan moneter, lebih spesifiknya:

1. Bidang Kelembagaan

- a. Sebuah. Jumlah individu KUBE
- b. Eksekusi hierarkis sesuai dengan konstruksi dan pembagian usaha
- c. Penyelenggaraan latihan-latihan, misalnya daftar kumpul perorangan, buku tamu, buku gerak, buku kas/keuangan, buku stok, buku muka dan lain-lain.

2. Wilayah sosial

- a. Sebuah. Jumlah dan sifat pertemuan bagian
- b. Jumlah dan penggunaan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS)
- c. Sebagian derajat ketabahan sosial
- d. Tingkat Partisipasi Sosial Anggota dalam Usaha Kredit Sementara (UKS)

3. Aspek keuangan

- a. Sebuah. Jumlah dan sifat Usaha Ekonomi Produktif (UEP) para pelaksananya
- b. Meningkatkan inovasi dalam penggunaan potensi finansial dan asset
- c. Seberapa besar komitmen untuk pengembangan LKM/Baitumal atau pergantian peristiwa yang menyenangkan
- d. Organisasi perkumpulan dengan perkumpulan yang berbeda dapat mempercepat pencapaian KUBE
- e. Kejujuran dan tanggung jawab

d. Tahapan Kegiatan KUBE-FM

Mengingat aturan KUBE dari Kementerian Sosial

(2011:31) yang artian tentang KUBE pengurus, ada beberapa tahapan latihan untuk mencapai tujuan KUBE, khususnya:

1. Tahap persiapan, latihan dalam perencanaan terdiri dari:

- a. Sebuah. Pemetaan sosial terutama yang berhubungan dengan kemiskinan

- b. Arah dan persepsi
 - c. Pendaftaran dan bukti yang dapat dikenali
 - d. Arahan pengenalan masalah, arahan motivasi, dan penilaian kesiapan (oleh otoritas kota/kelurahan, pejabat mitra, mentor praktis)
2. Tahap pelaksanaan, latihan pada tahap ini meliputi:
- a. Sebuah. Sosialisasi program ke masyarakat
 - b. Pilihan dan pengaturan pertemuan (target sasaran)
 - c. Bantuan Seleksi/kelayakan jenis usaha dan bantuan
 - d. Peredaran bantuan modal usaha
 - e. Bantuan anggaran
 - f. Kemampuan bisnis/kerja mempersiapkan individu KUBE
 - g. Bantuan dan pemeriksaan
3. Tahap kemajuan bisnis, latihannya meliputi:
- a. Sebuah. Arah sosial
 - b. Arahan untuk bantuan kemajuan bisnis
 - c. Cadangan/pendamping
 - d. Monitoring
 - e. Evaluasi
4. Tahap Kemitraan bisnis, pada tahap ini meliputi:
- a. Sebuah. Stok aset yang ada (aset normal, aset keuangan, aset sosial, dan SDM)
 - b. Membuat kesepakatan

- c. Pelaksanaan organisasi bisnis
 - d. Arah organisasi bisnis
 - e. Pengembangan jaringan asosiasi bisnis untuk menumbuhkan promosi dan akses permodalan
 - f. Menitoring
 - g. Evaluasi
5. Tahap terminasi dilakukan sebagai tahap penguatan akhir dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Sebuah. KUBE sudah mandiri
 - b. Latihan KUBE menyalahgunakan aturan
 - c. Latihan KUBE berhenti (sekelompok dibubarkan)

2.2.7 Teori Pelayanan Publik

Pemerintahan erat kaitannya dengan daerah setempat. Dengan tujuan agar bantuan tersebut sebaliknya disebut bantuan masyarakat. Publik berasal dari bahasa Inggris “public” dan yang mengandung arti keseluruhan penduduk dan Negara, kata public dalam bahasa Indonesia dicirikan sebagai keseluruhan penduduk, banyak individu dan berkerumun. Menurut Agus Dwiyanto (2005: 141) administrasi publik adalah "suatu kemajuan dari latihan yang diselesaikan oleh organisasi publik untuk mengatasi masalah kependudukan". Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Yeremias T Keban (2008: 60) bahwa spesialis tampaknya tidak seragam dan sering membingungkan siswa yang berkonsentrasi pada mereka. Keban, mengacu pada perspektif Lemay,

menyimpulkan bahwa "strategi publik berputar di sekitar pendekatan yang dibuat oleh kantor pemerintah atau otoritas pemerintah".

Administrasi publik sering dianggap sebagai gambaran keberadaan organisasi otoritas publik, karena administrasi publik bersentuhan langsung dengan permintaan kebutuhan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah suatu gerakan atau rangkaian latihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bantuan sesuai dengan ketentuan dan pedoman bagi setiap penduduk dan penduduk produk, administrasi dan administrasi tambahan yang diberikan oleh koperasi spesialis terbuka. Administrasi publik menurut Nina Rahmayanty (2013: 85) adalah, "semua pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh koperasi spesialis terbuka sebagai pekerjaan untuk memenuhi persyaratan penerima administrasi serta pelaksanaan pengaturan peraturan dan pedoman". Yang dimaksud dengan bantuan masyarakat menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 adalah semua kegiatan bantuan yang dilakukan oleh penyelenggaraan administrasi publik sebagai suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat administrasi dan pelaksanaan hukum. pengatur. Intisari dari bantuan publik adalah penataan dukungan yang luar biasa dari daerah yang merupakan lambang komitmen perangkat negara sebagai pekerja masyarakat. Ditinjau dari pengertian bantuan publik, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan publik adalah setiap tindakan bantuan yang diberikan oleh

otoritas publik kepada daerah, baik barang dagangan publik maupun administrasi publik.

2.3 Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan isu yang patut dicontoh yang masih menjadi isu khas, terutama di negara-negara non-industri termasuk Indonesia. Mengurus kebutuhan kemudian berubah menjadi pekerjaan yang menonjol dari banyak perkumpulan. Dengan demikian, muncul berbagai spekulasi, perspektif, atau pendekatan yang kemudian berdampak pada berbagai tatanan.

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh otoritas publik sebagai, dan individu yang tidak memiliki pekerjaan, dan tidak dapat mengatasi masalah yang sah bagi umat manusia.. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial mencantumkan hak-hak dasar kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan perlindungan sosial memberikan akses kepada masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan yang ada. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang lain selain Undang-undang tersebut diatas yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2011 bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya terarah, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang merupakan aturan yang memberikan tanggung

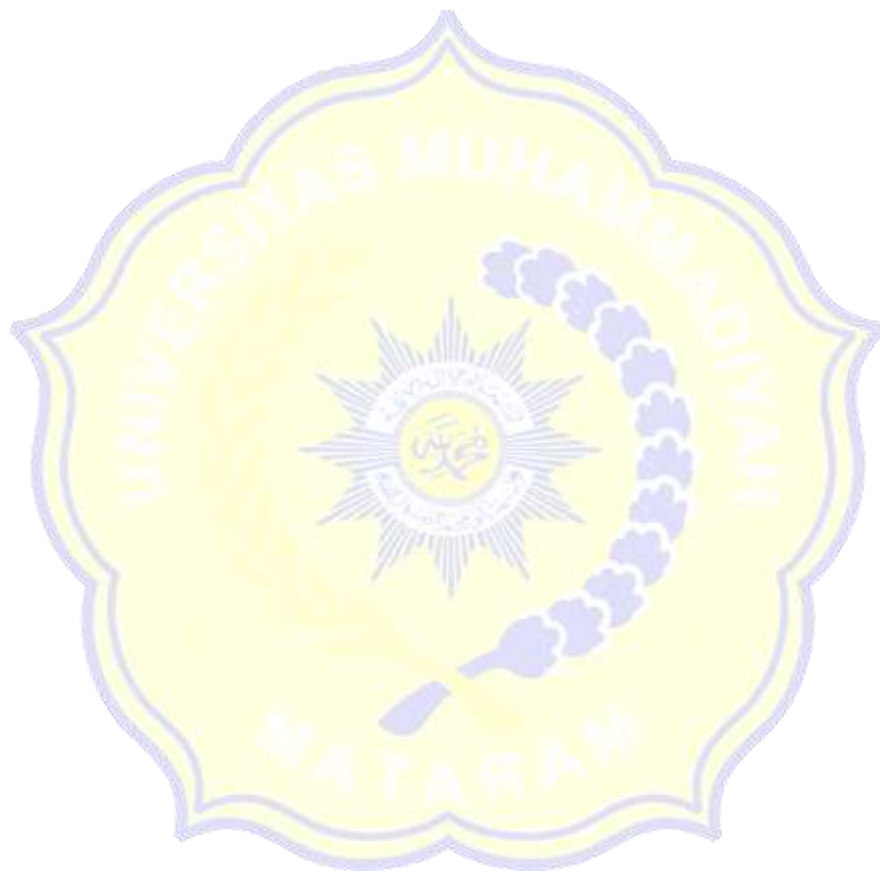
jawab pada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah.

Kementerian Sosial sebagai salah satu ciri organisasi yang menyoroti program peningkatan bantuan pemerintah ramah melakukan latihan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu program latihan yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui Sub Bagian Penanganan Masyarakat Miskin di Dinas Sosial adalah Program Hibah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang selanjutnya disebut KUBE. yang tercantum didalam Permensos No.2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Penanganan Fakir Miskin, yang dimana KUBE adalah perkumpulan keluarga kurang mampu yang dibentuk, dikembangkan dan diciptakan dalam upaya menyelesaikan usaha keuangan yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

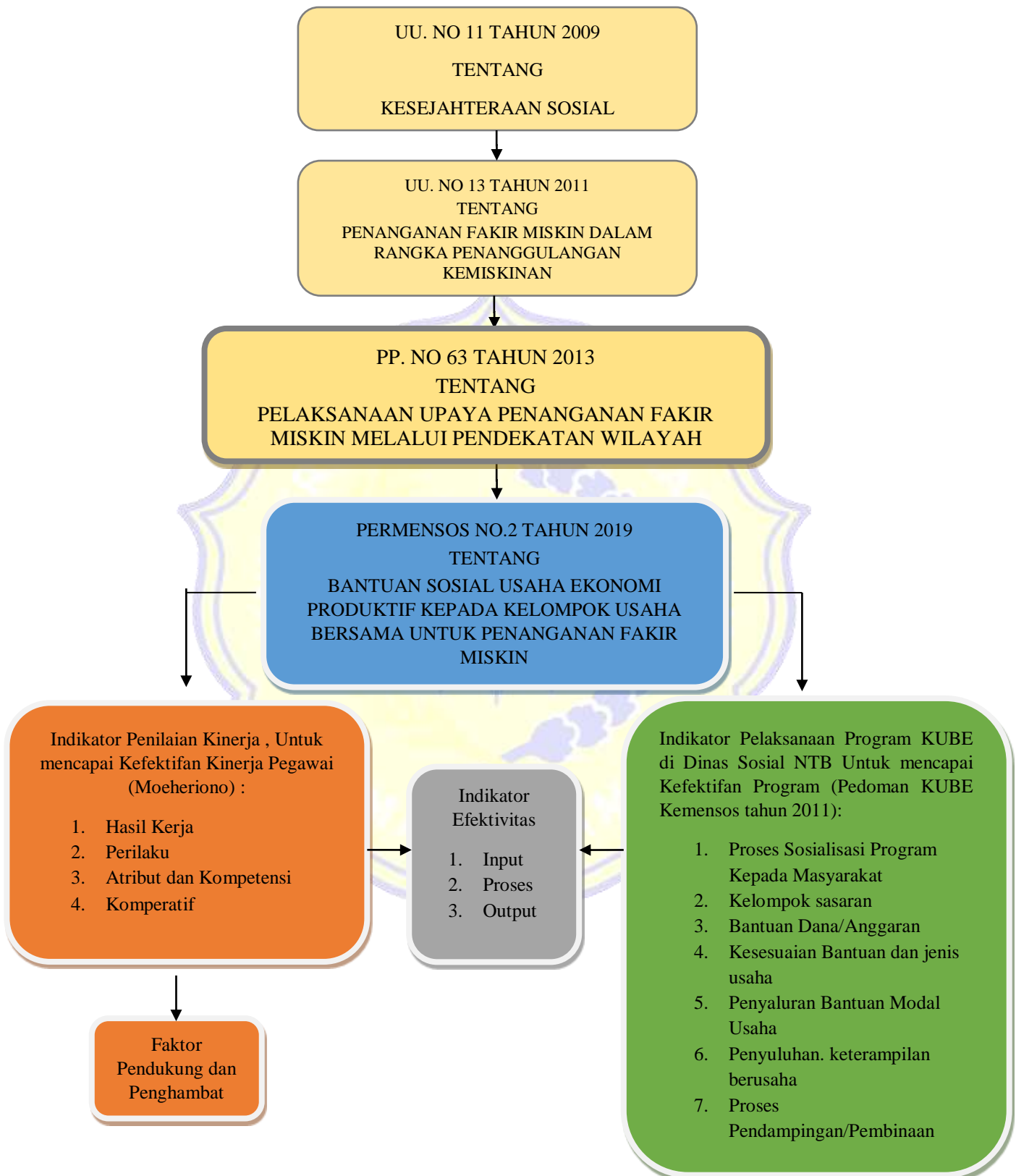
Beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial untuk mencapai kelangsungan pelaksanaan program ini, antara lain cara yang paling umum dari program KUBE-FM yang berbaur dengan daerah, sarasehan, subsidi/rencana keuangan bantuan dari otoritas publik untuk program. pelaksanaan, kewajaran jenis usaha dengan jenis bantuan modal usaha yang tersebar. , Penyampaian bantuan modal usaha kepada individu yang mengikuti program KUBE-FM, mengarahkan pada kemampuan usaha bagi individu yang merupakan individu dari kelompok KUBE-FM dan sistem

bimbingan untuk kelompok KUBE-FM yang dibingkai (sumber: Pedoman KUBE Kementerian Dinas Sosial 2011)

Selain itu ada beberapa indikator penilaian kinerja untuk mencapai keefektifan kinerja pegawai sub bagian PFM dalam menangani Program KUBE antara lain Hasil kerja, perilaku, atribut dan kompetensi, dan komperatif (Moehariono).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Nana Syaodih Sukmadinata (2010:60) mengungkapkan bahwa peneliti kualitatif adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menggambarkan dan merinci fenomena, peristiwa, latihan sosial, mentalitas, keyakinan, penegasan, perenungan individu secara mandiri maupun perkumpulan. Sependapat dengan Nana Syaodih, Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2005: 4) mengungkapkan bahwa pemeriksaan subjektif adalah teknik eksplorasi yang menghasilkan informasi grafis berupa kata-kata yang tersusun atau diungkapkan dari individu dan perilaku yang diambil.

Mengenai masalah pemeriksaan ini, spesialis memiliki rencana kerja atau aturan untuk mengarahkan eksplorasi menggunakan pemeriksaan subjektif, di mana perasaan, reaksi, data, ide, dan data yang terkumpul sebagai penggambaran dalam mengkomunikasikan masalah. Pemeriksaan subjektif adalah perkembangan latihan atau siklus pemisahan informasi atau data yang bersifat masuk akal sehubungan dengan suatu masalah dalam keadaan, sudut pandang, atau bidang tertentu dalam keberadaan item tersebut.

Mengingat penggambaran di atas, pendekatan eksplorasi ini merupakan metodologi subjektif yang memukau. Pendekatan ini digunakan untuk melihat situasi dengan suatu pertemuan, suatu barang, keadaan atau peristiwa di masa sekarang. Pemeriksaan yang jelas berkonsentrasi pada isu-

isu di arena publik dan keadaan tertentu, termasuk hubungan antara latihan, mentalitas, melihat dan siklus terus menerus dan dampak dari suatu fenomena. Selain itu sehingga para peneliti dapat mengamati informasi yang berbeda sehubungan dengan pelaksanaan Program Hibah KUBE-FM di Dinas Sosial Provinsi NTB, Kinerja Pegawai Sub Bagian PFM Dinas Sosial NTB .dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menangani program Hibah KUBE FM.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Sosial Provinsi NTB yang beralamat di Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) 83125. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena Dinas Sosial adalah dinas yang menangani dan bertanggung jawab penuh atas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi NTB.

Waktu penelitian di mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah kata-kata dan kegiatan narasumber sebagai data primer dan informasi atau catatan yang tersusun yang membantu keterangan saksi.

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh dari wilayah penelitian atau informasi yang diperoleh dari saksi atau sumber yang berkaitan dengan faktor penelitian atau kecukupan KUBE-FM. Strategi yang digunakan adalah teknik pertemuan hingga pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan ujian. Karena keterbatasan waktu dalam mengarahkan pemeriksaan. Jadi pencipta mengambil prosedur untuk wawancarai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pulau-pulau Kecil.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang memperoleh atau kumpulan oleh para ilmuwan dari berbagai sumber yang ada (spesialis sebagai tangan kedua). Informasi tambahan yang melibatkan para ahli seperti file, pengaturan penerima KUBE, catatan dari ilmuwan di lapangan, foto-foto latihan KUBE dan foto-foto pertemuan dengan berbagai sumber yang tidak ditetapkan oleh analis sebelum mengarahkan pemeriksaan.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Hamid Patilama dalam Sugioyono (2013:12), informan penelitian adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan data tentang keadaan dan keadaan yayasan pemeriksaan. Apalagi nara sumber/responden adalah individu yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Jadi dalam hal ini berkonsentrasi pada analisis yang digunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data penelitian adalah:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM)
3. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
4. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
5. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Kecil
6. Tim Pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)
7. Masyarakat yang terlibat dan menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM).

3.4 Instrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap penting dalam teknik logika, karena secara keseluruhan informasi yang dikumpulkan digunakan, kecuali penelitian eksplorasi dan untuk menguji spekulasi yang direncanakan. Pemilahan informasi merupakan teknik yang efisien dan standar untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Ada hubungan yang dapat diandalkan antara teknik pengumpulan informasi dan masalah eksplorasi yang akan diselesaikan, Nazir dalam Sugiyono (2013:174).

Dalam ulasan ini, para peneliti melibatkan strategi pengumpulan data dengan cara berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan persepsi langsung atau persepsi langsung adalah strategi pengumpulan informasi dengan menggunakan mata, tanpa panduan dari aparat standar lain untuk alasan ini. Persepsi adalah premis dari semua ilmu pengetahuan. Peneliti dapat bekerja berdasarkan informasi, khususnya informasi tentang alam semesta realitas yang diperoleh melalui persepsi Sugiyono (2016:226).

Ini memudahkan para ilmuwan untuk mengarahkan penelitian. Persepsi yang disinggung dalam penelitian ini adalah melihat langsung program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalanka di Dinas Sosial Provinsi NTB.

2. Wawancara

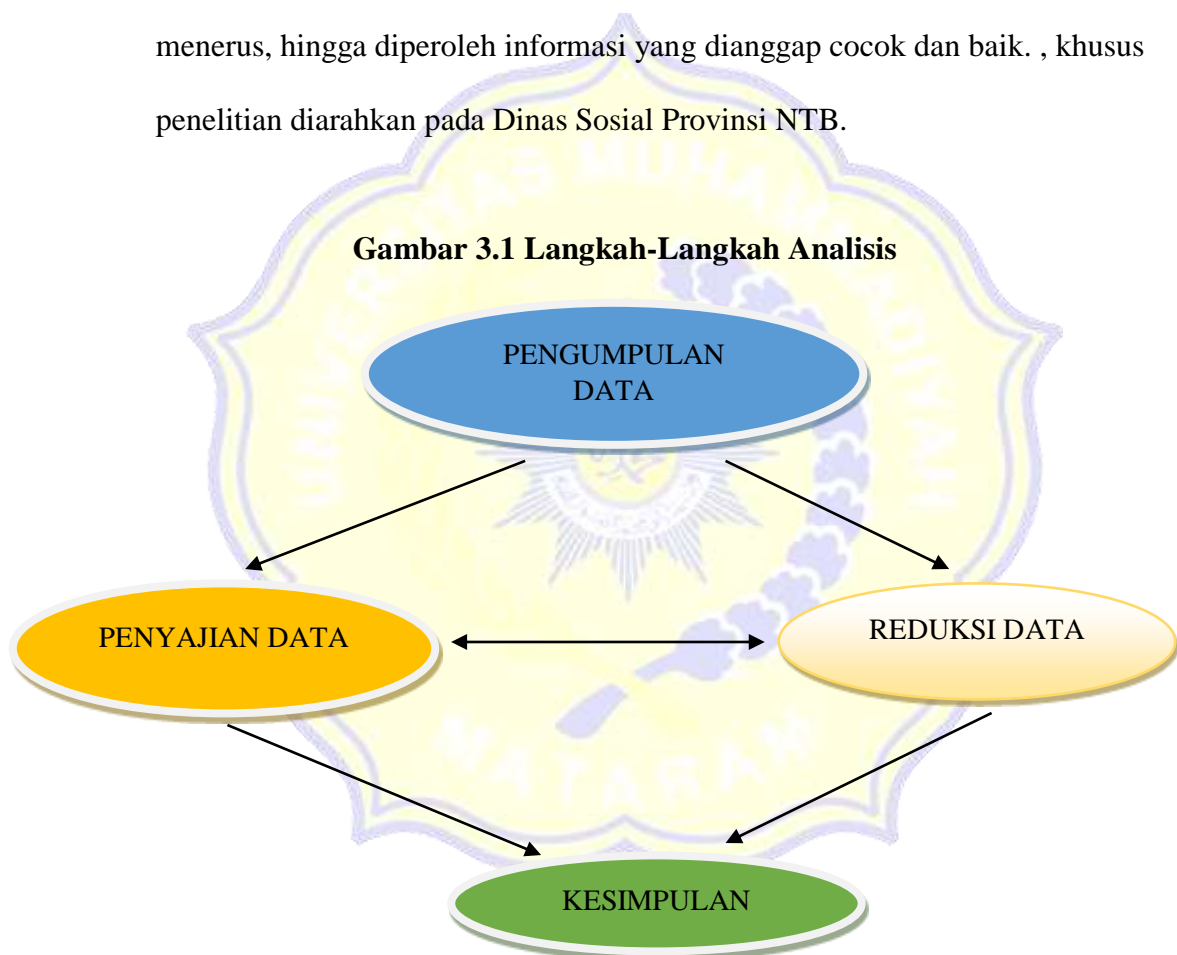
Wawancara adalah pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pemikiran melalui Q & A, sehingga signifikansi dapat dikembangkan pada titik tertentu. Wawancara digunakan sebagai prosedur pengumpulan informasi untuk mengarahkan laporan mendasar untuk mengamati masalah yang harus dianalisis, serta untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih atas ke bawah (Sugiyono, 2016: 231). Untuk situasi ini, analisis menggunakan wawancara tatap muka, di mana ilmuwan melakukan tatap muka langsung dengan subjek untuk memudahkan pencarian data, mengekstrak informasi dan dapat menjadi salah satu metode sederhana untuk mencatat masalah definisi ulasan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Arsip dapat melalui komposisi, gambar atau karya luar biasa seseorang (Sugiyono, 2016: 240). Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam mengumpulkan informasi dari persepsi dan pertemuan yang bermanfaat untuk hasil penelitian. Sebelum menyebutkan fakta objektif, para ilmuwan mencari referensi awal melalui buku, buku harian, artikel di web, dan berbagai sumber yang dipandang dapat diterapkan untuk masalah ini secara mendalam. Analisis menggunakan dokumentasi salah satu informasi atau tanda asli untuk menemukan teknik pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama.

3.5 Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi dilakukan setelah masuk di lapangan dan selesai di lapangan. Penyelidikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model intuitif yang dianggap layak untuk digunakan dalam model eksplorasi subyektif-ilustratif, mengingat latihan-latihan yang diselesaikan dalam pemeriksaan subyektif dilakukan terus-menerus, hingga diperoleh informasi yang dianggap cocok dan baik. , khusus penelitian diarahkan pada Dinas Sosial Provinsi NTB.



1. Pengumpulan Data

Beragam-macam informasi adalah bagian dasar dari latihan pemeriksaan informasi. Latihan pengumpulan informasi dalam penelitian ini

menggunakan pertemuan dan studi dokumentasi (Burhan, 2003:7). Cara paling umum untuk mengumpulkan informasi diselesaikan selama pra-studi dan selama penelitian. Dalam pergerakan ini tidak ada kesempatan khusus untuk menentukan batas waktu pengumpulan informasi di lapangan, karena pemilihan informasi akan selalu dilengkapi dan dibutuhkan selama pemeriksaan. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh para analis, berbagai informasi terbantu melalui persepsi langsung, memimpin pertemuan dengan saksi, membuat dokumentasi dan membuat catatan di lapangan.

2. Reduksi Data

Penurunan informasi adalah jenis pemeriksaan yang mengasah, memerintahkan, mengoordinasikan, membuang informasi yang tidak berguna dan mengatur informasi sehingga ujung terakhir dapat ditarik dan diperiksa.

3. Penyajian Data

Pertunjukan informasi adalah sekumpulan data otoritatif yang memungkinkan dilakukannya penelitian. Tayangan informasi diharapkan dapat menelusuri contoh-contoh penting dan memberikan kesempatan untuk mencapai tekad dan kegiatan pemberian.

4. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan penting untuk gerakan desain total. Ends juga dikonfirmasi selama review. Akhir ditarik sejak analis mengumpulkan catatan, desain, penjelasan, pengaturan, judul kausal, dan rekomendasi yang berbeda.

3.6 Keabsahan Data

Penilaian keabsahan informasi secara mendasar, selain digunakan untuk membantah tuduhan terhadap eksplorasi subjektif yang dikatakan informal, juga merupakan komponen yang tidak dapat dibedakan dari kelompok informasi pada pemeriksaan subjektif (Moleong, 2007:320).

Akibatnya terjadi triangulasi sumber, triangulasi metode pemilahan informasi, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan informasi dilakukan dengan cara mengecek informasi yang didapat melalui beberapa sumber. Informasi yang didapat dipecah oleh analis sehingga suatu akhir kemudian diminta kesepakatan (sebagian cek) dengan tiga sumber informasi (Sugiyono, 2007:274)
2. Triangulasi Teknik untuk menguji keabsahan suatu informasi dilakukan dengan benar-benar melihat informasi pada sumber yang sejenis dengan berbagai metode. Misalnya, untuk benar-benar melihat informasi sepihak melalui wawancara, persepsi, dokumentasi. Dalam hal prosedur pengujian keterpercayaan informasi menghasilkan berbagai informasi, para ilmuwan mengarahkan pembicaraan lebih lanjut tentang sumber-sumber informasi yang berlaku yang informasinya dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).
3. Triangulasi waktu, informasi yang dikumpulkan dengan strategi wawancara menjelang awal hari ketika saksi masih baru, akan memberikan informasi yang lebih substansial dengan tujuan agar lebih

valid. Selain itu cenderung diselesaikan dengan cara mengecek dengan pertemuan, persepsi atau cara yang berbeda dalam berbagai waktu atau keadaan. Dalam hal hasil eksperimen menghasilkan berbagai informasi, hal itu dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian informasi tersebut (Sugiyono, 2007: 274)

